

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholders*. Apabila tidak ada pengungkapan yang memadai, para *stakeholder* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Arief dan Agus, 2007). Teori keagenan (*agency theory*) berusaha menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi konflik atau masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976 dan Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyoto dkk. (2000) dalam Darmawati (2006) konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan. Sedangkan, menurut Cadbury (1992) dalam Darmawati (2006) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah sistem untuk mengarahkan (*direct*) dan mengendalikan (*control*) suatu perusahaan/korporasi.

Menurut hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (*Asia Development Bank*), krisis yang terjadi di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan (GCG) *Good Corporate Governance* (Husein, 2010 dalam Hikmah dkk., 2011).

Timur (2012) menyatakan bahwa praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri, dan pada umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* muncul setelah terjadinya krisis multidimensi pada pertengahan 1997. Krisis ini dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kemudian menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Menurut hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (*Asia Development Bank*), krisis yang terjadi di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan *good corporate governance*. *Corporate governance* mengalami perkembangan sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan (Husein, 2010 dalam Hikmah dkk., 2011).

Ada banyak faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh dalam luas pengungkapan *corporate governance*. Faktor pertama yang diduga memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran

Semakin besar perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh publik sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Pernyataan ini di dukung oleh Hikmah dkk. (2011) dan Rini (2010). Namun, Zulaikha (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan.

Faktor kedua yang diduga memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* yaitu umur *listing*. Yularto dan Chariri (2003) dalam Hikmah dkk. (2011) menyatakan bahwa semakin lama umur perusahaan akan lebih berpengalaman dalam pengungkapan dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi sehingga akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Penelitian Hikmah dkk. (2011) menemukan bahwa umur *listing* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*. Penelitian Hikmah dkk. (2011) juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2006), namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Rini (2010) yang menyatakan bahwa dimana tidak ada pengaruh umur *listing* terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Faktor ketiga yang diduga memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* yaitu profitabilitas. *Profit margin* dan *earning return* sebagai variabel yang berhubungan secara positif dalam variasi yang ditentukan dalam luas pengungkapan perusahaan dengan alasan laba yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas. Manajer ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang profitabilitas yang dicapai perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi untuk manajemen, untuk itu

dalam Hikmah dkk., 2011). Penelitian Kusumawati (2006) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Hikmah dkk. (2011) dan Wibisono (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Faktor keempat yang diduga memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dalam Hikmah dkk. (2011) menunjukkan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan *corporate governance* terhadap laporan tahunan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen juga akan semakin besar pengaruhnya. Penelitian Hikmah dkk. (2011) didukung oleh Gunawan (2012) dan Rahayu (2008) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2010) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Faktor terakhir yang diduga memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* yaitu komite audit. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Komite Audit merupakan

meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi. Semakin berkualitasnya komite audit maka informasi yang diungkapkan juga semakin berkualitas dan luas dalam mengungkapkan. Penelitian tentang hubungan komite audit terhadap daya pengungkapan *corporate governance* telah dilakukan oleh Wawo (2010) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2006) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) telah mempublikasikan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* pada tahun 2006 sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*, termasuk rekomendasi mengenai pengungkapan praktik *good governance*. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan menunjukkan hasil

variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2011)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hikmah dkk. (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perbankan sementara penelitian ini meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini juga menambahkan variabel independen yaitu komite audit yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Selain itu, Pemilihan data tahun 2011 dikarenakan periode waktu tersebut adalah data terbaru pada saat penelitian ini dilakukan.

B. Batasan Masalah.

Faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam penelitian ini yaitu: Ukuran perusahaan, umur *listing*

1. Faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dan komite audit

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
2. Apakah umur *listing* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
5. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
2. Untuk menguji apakah umur *listing* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
3. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

